MEMAHAMI ASURANSI: TUJUAN, POLIS, DAN PRINSIP ASURANSI MENGIKUTI KEPENTINGAN

Keukeu Nurul Latifah *1

Ayuni Anggun Pratiwi ²

Hilma Kamila ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002145@student.unsil.ac.id¹, 231002147@student.unsil.ac.id²,
231002154@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko yang berperan memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan kerugian di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar asuransi dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama: tujuan asuransi, struktur dan fungsi polis, serta prinsip-prinsip utama asuransi yang berkaitan dengan kepentingan (insurable interest). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada literatur hukum, ekonomi, dan praktik asuransi terkini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan asuransi tidak hanya terbatas pada perlindungan finansial, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi dan kepercayaan sosial. Polis sebagai dokumen hukum memegang peran sentral dalam menjabarkan hak dan kewajiban para pihak, sementara prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan menjadi fondasi legal yang menentukan validitas suatu kontrak asuransi. Dengan memahami ketiga aspek ini secara utuh, masyarakat dan pelaku industri asuransi dapat mengelola risiko secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Kata kunci: asuransi, polis, kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip asuransi, manajemen risiko

Abstract

Insurance is a vital instrument in risk management, providing financial protection against potential future losses. This article aims to present a comprehensive understanding of the fundamental concepts of insurance by focusing on three main aspects: the purpose of insurance, the structure and function of the insurance policy, and the core principles of insurance related to insurable interest. Using a descriptive qualitative approach, this study draws upon legal, economic, and contemporary insurance practices literature. The findings indicate that the purpose of insurance goes beyond mere financial protection; it also contributes to economic stability and social trust. The insurance policy, as a legal document, plays a central role in outlining the rights and obligations of the involved parties, while the principle of insurable interest serves as a legal foundation that determines the validity of an insurance contract. A thorough understanding of these three aspects enables both the public and insurance industry stakeholders to manage risks more effectively and responsibly.

Keywords: insurance, policy, insurable interest, insurance principles, risk management

PENDAHULUAN

Asuransi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mengelola risiko finansial di masyarakat modern. Melalui mekanisme premi dan kompensasi, asuransi memungkinkan individu atau entitas memperoleh perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat kejadian tak terduga. Prinsip-prinsip dasar seperti indemnitas, subrogasi, kontribusi, dan kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) menjadi fondasi hukum dan operasional dari kontrak asuransi. (B. Parera & Tumanggor, 2021)

Keentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) khususnya memegang peran krusial karena tanpa adanya kepentingan yang sah terhadap objek atau subjek yang diasuransikan, kontrak asuransi dapat dianggap sebagai spekulasi atau perjudian, yang memicu masalah moral hazard dan ketidakpastian hukum. Historisnya, regulasi seperti *Marine Insurance Act 1746* dan *Life Assurance Act 1774* di Inggris memperkenalkan keharusan adanya insurable

interest untuk membatasi praktik-praktik asuransi yang dianggap menyimpang dari tujuan asuransi.(Cao, 2025)

Di Indonesia, meskipun UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur berbagai aspek asuransi, terdapat kekosongan normatif terkait karakteristik dan standar penerapan asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Sebagai contoh, sebuah penelitian menemukan bahwa karakteristik kepentingan tersebut belum dibakukan dengan jelas dalam undang-undang, sehingga interpretasi dalam praktik asuransi bisa jadi berbeda antar perusahaan asuransi dan antar kasus.(Navisa, 2020)

Selain aspek hukum, tujuan asuransi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kepercayaan sosial, di mana masyarakat merasa aman karena risiko dapat dialihkan kepada pihak asuransi. Keberadaan polis sebagai dokumen hukum yang menjabarkan hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, serta mekanisme klaim dan pembayaran premi, menjadi aspek praktis yang harus dipahami secara mendalam agar penyusunan polis, pengelolaan risiko, dan penegakan prinsip-prinsip asuransi sesuai kepentingan berjalan efektif.(B. Parera & Tumanggor, 2021)

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci suatu fenomena atau kondisi tertentu. Untuk memperkuat data analisis, tulisan ini juga menggunakan beberapa artikel penting yang mengkaji tentang pemahaman asuransi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dan menganalisis dari sudut pandang pemahaman asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Menurut Subekti, asuransi termasuk dalam perjanjian **untung-untungan** (*kansovereenkomst*), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Kejadian tersebutlah yang nantinya menentukan apakah salah satu pihak memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian (Putri, 2021). Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, asuransi dijelaskan sebagai perjanjian antara dua pihak, satu pihak membayar iuran, dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan penuh sesuai dengan isi perjanjian bila terjadi sesuatu pada pihak pertama (Yazid et al., 2022). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2011, Asuransi Syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara banyak orang melalui pengelolaan dana dalam bentuk aset atau tabarru'. Dana tersebut kemudian digunakan sebagai pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu, dengan perjanjian (akad) yang dijalankan sesuai prinsip Syariah (Kholilah et al., 2024).

Dalam UU No. 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar premi. Ganti rugi ini bisa berupa penggantian atas kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, maupun pembayaran yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi pada dasarnya adalah perjanjian di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang sifatnya tidak pasti. Sejalan dengan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi memiliki tiga unsur utama : Pertama, **tertanggung** yaitu pihak yang membayar premi kepada penanggung. Kedua, **penanggung** yaitu pihak yang berjanji memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada tertanggung. Ketiga, **peristiwa tidak pasti** yaitu

kejadian yang belum jelas kapan atau apakah akan terjadi, yang menjadi dasar adanya perjanjian asuransi (Wati, 2023).

Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung (insured) bila terjadi atau yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian (Ali, 2008).

Secara umum, asuransi memiliki tujuan pokok yaitu mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian. Melalui pembayaran premi, tertanggung memindahkan beban risiko kepada penanggung. Jika suatu peristiwa merugikan benar-benar terjadi, penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai nilai pertanggungan. Namun, prinsip utama yang ditekankan adalah bahwa tertanggung harus benar-benar memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan dan kerugian yang dialami nyata, sehingga perjanjian asuransi tidak boleh digunakan sebagai sarana spekulasi (Putri, 2021).

Sedangkan tujuan utama asuransi dalam perspektif syariah sangat mulia karena berlandaskan pada prinsip tolong-menolong, menjaga keselamatan bersama, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Harta dipandang sebagai karunia Allah Swt. yang harus bermanfaat secara sosial, bukan hanya pribadi. Premi yang dibayarkan dalam asuransi syariah dimaknai sebagai bentuk solidaritas untuk membantu sesama demi memperoleh ridha-Nya, sekaligus mempererat persatuan dan persaudaraan antar manusia (Siddiq, 2017).

Polis

Polis dalam asuransi syariah merupakan dokumen perjanjian (akad) antara peserta (pemegang polis) dan perusahaan asuransi syariah, serta antara peserta dengan peserta lainnya, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mekanisme saling menolong dan melindungi berdasarkan prinsip syariah. Dalam polis syariah, akad utama yang digunakan termasuk tabarru' (hibah atau kontribusi sukarela antar peserta) dan mudharabah (bagi hasil dari pengelolaan dana) jika ada unsur investasi. Akad ini berbeda dengan polis asuransi konvensional, yang umumnya hanya menggunakan unsur jual-beli risiko atau kontrak komersial tanpa elemen tolong-menolong dan tanpa keharusan berbagi surplus di antara peserta. (Panisa et al., 2025)

Beberapa elemen penting yang perlu ada dalam polis syariah:

1. Kontribusi (iuran/tabarru')
Polis harus menjelaskan besarnya iuran/tabarru', bagaimana iuran tersebut dikumpulkan, dan digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.
2. Manfaat (benefit) yang dijamin
Polis harus secara jelas menyebutkan jenis risiko yang dijamin (misalnya kematian, kecelakaan, kerusakan harta, kerugian finansial tertentu) dan kondisi-kondisi klaim (syarat dan dokumen yang dibutuhkan) sesuai prinsip syariah.
3. Pengelolaan Dana
Dana yang diperoleh dari kontribusi peserta dikelola secara syariah (bebas dari riba, gharar berlebihan, maysir), dan jika ada investasi, penggunaannya harus sesuai fatwa dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Surplus atau Sisa Dana

Jika kontribusi dan biaya klaim serta operasional menghasilkan surplus, sebagian dari surplus tersebut dapat dibagikan kepada peserta, atau dipakai untuk kepentingan sosial sesuai ketentuan dalam polis.

5. Pengawasan Syariah dan Kepatuhan Prinsip

Polis harus mencantumkan bahwa seluruh operasional (akad, manfaat, pengelolaan dana, investasi) diawasi oleh DPS dan tunduk pada regulasi syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Arijulmanan, 2015)

Polis syariah harus mencerminkan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan (transparency). Di dalam polis harus ada informasi lengkap kepada calon peserta mengenai apa yang dijamin, syarat klaim, biaya-biaya operasional (termasuk fee perusahaan), pembagian surplus, dan risiko-risiko yang tidak dijamin. Regulasi nasional (misalnya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) harus mendukung agar polis asuransi syariah tidak hanya formalitas syariah secara label, tetapi secara substansial memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perlindungan hukum juga penting agar pemegang polis memiliki hak yang jelas jika ada perselisihan atas interpretasi polis. (Prayogo & Syafaat, 2023)

Asuransi Mengikuti Kepentingan

Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengedepankan konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip saling menjaga kepentingan antar peserta. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan komersial perusahaan, melainkan digunakan sebagai dana *tabarru'* (dana tolong-menolong) untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Dengan demikian, risiko kerugian menjadi tanggung jawab bersama yang dikelola secara kolektif menggunakan prinsip *risk-sharing* atau pembagian risiko. Premi yang dibayarkan juga tidak hangus jika tidak ada klaim, dan dana dapat dikembalikan sesuai ketentuan, berbeda dengan asuransi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah sangat mengikuti kepentingan peserta secara adil dan transparan sesuai fatwa MUI. (Fauzi, 2019)

Kepentingan dalam asuransi syariah melekat pada objek asuransi dan peserta, dimana asuransi dikelola untuk melindungi kepentingan peserta dari risiko yang akan terjadi. Dalam paradigma asuransi syariah, akad yang digunakan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (judi). Selain itu, pengelolaan dana asuransi syariah dilakukan dengan memilih instrumen investasi yang halal serta diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dana peserta tidak diinvestasikan pada hal yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian atau minuman keras. Inilah yang membuat kepentingan peserta terlindungi secara syariah, sekaligus mengoptimalkan manfaat yang diperoleh peserta dari asuransi ini. (Panisa et al., 2025)

Fungsi utama asuransi syariah yang mengikuti kepentingan peserta juga tercermin dalam manfaat yang diterima peserta, seperti proteksi kesehatan, proteksi finansial jangka panjang, dan kepastian dana investasi yang halal. Keunggulan lain adalah tidak adanya unsur *riba* dan dana tidak bisa hangus karena dana premi dianggap sebagai dana titipan (*wadiah*). Transparansi dalam pengelolaan dana serta pembagian surplus *underwriting* yang adil menjadi bagian dari prinsip mengikuti kepentingan peserta secara menyeluruh. Oleh karena itu, asuransi syariah memberikan solusi perlindungan yang tidak hanya finansial namun juga sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi peserta yang menginginkan perlindungan sesuai prinsip syariah. (Navisa, 2020)

KESIMPULAN

Asuransi syariah menekankan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan, dengan dasar utama asuransi mengikuti kepentingan (*insurable interest*). Prinsip ini memastikan bahwa hanya kepentingan yang sah dan halal yang dapat diasuransikan, sehingga menghindari spekulasi, *gharar*, dan *maysir*. Polis syariah berfungsi sebagai instrumen transparansi sekaligus pengikat akad, dengan dana *tabarru'* dikelola secara syariah dan diawasi oleh DPS. Dengan demikian,

asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menjaga nilai moral, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arijulmanan. (2015). Asuransi Syariah (Takaful). *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 3(6), 323–346.
- B. Parera, A., & Tumanggor, M. . (2021). Application Of Business Principles Insurance In Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jlph.v2i1.49>
- Cao, S. (2025). The Evolution of Insurable Interest in Law and Practice: A Comparative Analysis of Marine and Life Insurance. *Law and Economy*, 4(2), 44–50. <https://doi.org/10.56397/le.2025.02.06>
- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi*. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)
- Navisa, F. D. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 188. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7490>
- Panisa, P., Khatima, H., Nasution, S. J., & Harahap, N. (2025). Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24903/je.v14i1.3240>
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162>
- Sintha Putri, F., & Agustianto, M. andre. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>
- Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>
- Wati, R. (2023). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.927>
- Yazid, M., Universitas, D., Sunana, N., & Surabaya, A. (2022). 4755-Article Text-13611-1-10-20220706 (1). 17(2), 164–177.
- Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*.